

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perkembangan zaman dan teknologi secara masif turut mengembangkan konsep baru tentang paradigma aktivisme digital. Infrastruktur digital mendukung adanya teknologi untuk mengecilkan ruang, jarak, dan waktu supaya bisa terkoneksi antara satu sama lainnya dalam sebuah ruang bernama ruang siber (*cyberspace*). Ruang siber juga berperan pada bidang politik kerap disebut sebagai *cyberpolitics*, dampaknya bagi negara demokrasi berfungsi sebagai medium dalam menyampaikan kebebasan berpendapat baik itu individu maupun kelompok.

Aktivisme digital melalui tagar juga berperan besar sebagai media propaganda karena penggunaan tagar berfungsi untuk menyimpan dan mencari suatu informasi atau berita tertentu lewat pencarian “tagar” tersebut. Penggunaan tagar seperti #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga ditelaah dengan metode analisis wacana kritis bertujuan untuk menelusuri beberapa dimensi: analisis teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial. Penelitian menghasilkan temuan dari tagar #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga sebagai berikut:

Dimensi analisis teks menunjukkan bahwa akun @fraksirakyat_id memiliki narasi untuk memperjuangkan serta menyuarakan tuntutan protes karena praktik dinasti politik. Fraksi Rakyat Indonesia dalam menggunakan baik itu tagar #MosiTidakPercaya maupun #MahkamahKeluarga menganggap dinasti politik ini

merusak tatanan berbangsa dan bernegara melalui nepotisme dan mengancam masa depan generasi oleh kerusakan lingkungan dari investasi berlebihan.

Pada dimensi praktik kewacanaan produksi teks dari akun @fraksirakyat_id memperlihatkan bentuk akunnya berpihak kepada rakyat, terutama bagi mereka kelompok marginal dan rakyat tertindas. Konsumsi teks bagian tagar #MosiTidakPercaya sebagian warganet meragukan keaslian narasi dari postingan akun @fraksirakyat_id. Hal ini terlihat dari komentar warganet menanggapi pemilik akun dengan kata “postingan berbayar” dan “disuruh Banteng”. Namun, sebagian lainnya tetap mendukung pernyataan dari postingan #MosiTidakPercaya dengan meminta supaya ada pengadilan terutama untuk Jokowi. Sedangkan tagar #MahkamahKeluarga mendapatkan respons afirmasi dari kebanyakan warganet menanggapi isu nepotisme dari Presiden Jokowi yang mempraktikkan dinasti politik.

Terakhir, dimensi praktik sosial menjelaskan bahwa kedua tagar berupa #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga bersumber dari kekecewaan dan kekhawatiran publik atas peristiwa dinasti politik Presiden Jokowi. Kedua tagar itu menuntut protes adanya pertanggungjawaban secara patut pada praktik dinasti politik yang dilakukan jelas oleh Presiden Jokowi.

Dengan demikian, kedua tagar terbentuk karena protes dinasti politik terlebih publik menganggap ini adalah kerusakan. Protes ini dianggap sebagai tindakan nepotisme sehingga publik menuntut protes Jokowi bertanggung jawab atas semua kerusakannya. Upaya dinasti politik ini dibangun Presiden Jokowi dengan adik iparnya, Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang

mengabulkan permohonan batas usia minimal Capres-Cawapres. Kekecewaan publik karena kerusakan ini memunculkan #MosiTidakPercaya pada pemerintahan Presiden Jokowi. Selain itu, konflik kepentingan antara Anwar Usman sebagai Ketua MK sekaligus Paman dari Gibran selaku anak sulung Jokowi, mengakibatkan tanggapan buruk dari publik baik itu bagi Presiden Jokowi maupun MK yang akhirnya publik mengubah singkatan MK menjadi “Mahkamah Keluarga”.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini turut terdapat sejumlah saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian diharapkan bisa mendalami sejumlah aktivisme digital selain dalam ranah media sosial, seperti halnya ranah donasi di aplikasi atau petisi daring. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menganalisis secara lebih mendalam dan mendetail terkait objek tagar dari akun media sosial yang lebih beragam di Indonesia. Selain itu, perlu diperhatikan alternatif metode pengumpulan data dan cara kerja media sosial lainnya seperti Youtube untuk mengambil ide penelitian.